

## Berkas Mantan Bupati Bangli Tak Kunjung Rampung

★ Periksa Belasan Saksi, Termasuk Bupati Bangli

DENPASAR, NusaBali

Meski sudah berjalan hampir satu tahun, Kejari Bangli belum juga menyelesaikan penyidikan korupsi UP Sektor Pertambangan dengan terdakwa mantan Bupati Bangli, I Wayan Arnawa. Padahal sudah ada belasan saksi yang diperiksa termasuk Bupati Bangli saat ini, I Made Gianyar dan Wakil Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta.

Kasi Pidsus Kejari Bangli, Elan Jaelani mengatakan ada beberapa petunjuk yang harus dilengkapi dalam berkas perkara dengan terdakwa Arnawa. Namun Elan optimis bisa menyelesaikan berkas perkara Arnawa dalam waktu dekat ini. "Sekarang masih P-19. Kami optimis dalam waktu dekat akan menyelesaikan," ujar Elan Jumat (29/9).

Saat ini sudah ada belasan saksi yang diperiksa dalam perkara ini. Diantaranya Bupati Bangli, Gianyar

dan Wakil Bupati Sedana Arta. Selain itu dua terpidana dalam kasus ini yaitu AA Gede Alit Darmawan (mantan Kadipenda Bangli 2009-2010) dan Bagus Rai Dharmayudha (mantan Kadispenda Bangli 2006-2008 yang kini sudah pensiun) juga telah diperiksa. "Kami sudah periksa Bupati dan Wakil Bupati Bangli untuk perkara ini," tegasnya.

Nama Bupati Bangli, Gianyar memang terus disebut dalam persidangan sebelumnya dengan terdakwa dua mantan Kadispenda. Bahkan Gianyar juga disebut sempat menerima aliran Upah Pungut (UP) tersebut namun sampai saat ini tidak tersentuh. "Untuk Pak Gianyar statusnya masih saksi," lanjut Elan.

Seperti diketahui, penetapan Arnawa sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pengembangan atas perkara korupsi UP Sektor Pertambangan

Bangli dengan terdakwa mantan Kadipenda Darmawan dan Dharmayudha. Dalam pengembangan, Arnawa diketahui mendatangi SK UP Sektor Pertambangan pada tahun 2006-2008 yang dibagikan kepada puluhan staf dan pejabat Dispenda Bangli serta beberapa pejabat.

Padahal kegiatan pemungutan pajak di sektor itu tidak pernah dilakukan. Dalam biaya pungutan itu, Arnawa ikut menikmati dana UP yang dibagikan oleh terdakwa Alit Darmawan dan Rai Dharmayudha.

Dalam kasus ini, dua mantan Kadispenda sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berbeda. Untuk AA Gede Alit Darmawan (mantan Kadipenda Bangli 2009-2010) divonis pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan dan Bagus Rai Dharmayudha (mantan Kadispenda Bangli 2006-2008 yang kini sudah pensiun) divonis 2 tahun dan 8 bulan. rez

Edisi : Sabtu, 30 September 2017

Hal : 5

# Anggota Dewan Kembalikan Mobil Dinas

Sudah ada 14 mobil dinas anggota DPRD Badung yang dikembalikan. Masih ada 26 unit mobil yang belum kembali.



• NUSABALI/ARI SISWANTO

MOBIL dinas anggota DPRD Badung yang telah dikembalikan, Jumat (29/9), terparkir di basement kantor dewan di Puspem Badung di Sempidi, Kecamatan Mengwi.

MANGUPURA, NusaBali

Anggota DPRD Badung ramai-ramai mengembalikan mobil dinas yang selama ini mereka tunggangi. Pengembalian mobil dinas merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Anggota DPRD. Aturan ini menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2004.

Sebagai gantinya masing-masing anggota dewan akan mendapatkan uang transport yang nilainya disebut-sebut puluhan juta rupiah. Berdasarkan pantauan, Jumat (29/9), deretan mobil dinas jenis Innova sudah banyak terparkir di basement kantor dewan di Puspem Badung, Sempidi, Kecamatan Mengwi. Ada sekitar 14-an unit Innova terparkir. Namun bila dihitung dari jumlah anggota dewan Badung sebanyak 40 orang, maka masih ada 26 orang yang belum mengembalikan.

Anggota DPRD Badung Nyoman Satria yang paling per-

tama mengembalikan mobil dinas, mengatakan meski Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penjabaran PP 18 Tahun 2017 belum turun, pihaknya sebagai anggota dewan menaati aturan itu, dan sudah mempersiapkan diri. "Karena kami tidak lagi mendapat fasilitas mobil dinas, diganti ke tunjangan transportasi," kata dia.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan kendari tidak lagi memiliki mobil dinas, namun sama sekali tak mengganggu kinerjanya. Selain itu, pihaknya telah memiliki kendaraan pribadi, makanya kini menggunakan kendaraan tersebut untuk bekerja. "Intinya saya tak masalah mobil dinas dikembalikan, saya bisa manfaatkan mobil pribadi saya untuk ke kantor dan menemui masyarakat," kata politisi asal Mengwi, itu.

Disinggung mengenai be-

saran uang transportasi yang bakal diterima masing-masing anggota dewan, Satria mengaku belum mengetahuinya. "Saya belum tahu berapa nantinya direstui oleh provinsi karena Pergub-nya belum turun," tandasnya.

Sementara, Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengakui bahwa sejumlah anggota DPRD Badung telah mengembalikan mobil dinasnya. Pengembalian mobil dinas ini murni karena aturan baru yang dikeluarkan pemerintah pusat.

"Karena dalam aturan tersebut sudah mendapat tunjangan transportasi, mereka tidak boleh mendapat fasilitas mobil dinas," katanya. Nah, terkait uang transportasi sebagai pengganti dari penarikan mobil dinas, politisi asal Desa Dalung, Kuta Utara, itu belum mengetahui pasti, lantaran Pergub belum turun. **asa**

Edisi : Sabtu, 30 September 2017

Hal : 2